

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang dan penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang serta kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang adalah berupa perbuatan penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila dan tidak masuk kerja tanpa izin. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 6 s/d Pasal 14 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2011. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar, Komisi Kode Etik juga berpedoman pada keyakinannya dan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar bersifat kumulatif yaitu berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang adalah adanya intervensi dari atasan untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh terduga pelanggar kepada pimpinan, kurangnya pemahaman perangkat KKEP dalam pelaksanaan sidang KKEP diatasi dengan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Polda Jateng dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dari Bidang Propam serta Divpropam Mabes Polri setahun sekali. Adanya rasa kasihan ataupun sikap *ewuh pekewuh* dari perangkat KKEP terhadap keluarga terduga pelanggar diatasi dengan melihat perkembangan terduga pelanggar apakah sudah mendapatkan efek jera atas pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci : Penerapan Sanksi, Kode Etik , Wilayah Hukum Polres Semarang

ABSTRACT

This research is about the application of sanctions against members of the Indonesian police officer who violate the code of ethics in Polres Semarang's jurisdiction. This study discusses the forms of ethic code violations that occur in Polres Semarang' jurisdiction and Application of sanction to the members of the Indonesian police officer who violate the code of ethic that occurred in the jurisdiction of Polres Semarang and constraints in implementing sanctions against members of the Indonesian police officer who violate the code of ethic in the jurisdiction of Polres Semarang and the efforts to overcome it.

The method used is a sociological juridical approach. Specification used in this research is descriptive. The data used are primary data and secondary data. The research methods used are field studies and literature. Data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this study are that, The forms of ethic code violations that occur in the territory of Polres Semarang's jurisdiction are drug abuse, abuse of authority, sexual misconduct and absence from duty without permission. Such actions constitute a violation of Article 6 to Article 14 of the Perkap Polri No. 14 of 2011 about Kode Etik Profesi Polri (Indonesian Police Ethic Code), The application of sanctions against members of the Police who commit violations of the code of conduct in the area of the Law Commission conducted by Semarang Polres code of conduct by Police based on Act No. 2 Tahun 2002, Perkap Police number 14 in 2011 about the code of ethics of the profession and the police, Perkap Police number 19 in 2011. In dropping sanctions against violators of the code, the Commission is also based on his belief and supported at least two tool evidence. The sanctions imposed against the offenders are cumulative, namely in the form of administrative sanction for ethics and sanctions, The obstacles in implementing sanctions against members of the police who violate the code of conduct in the jurisdiction of Police Semarang is intervention from superiors. To overcome this by explaining that as much detail as the violations that have been committed by the alleged infringer to the leadership, a lack of understanding of the KKEP in the implementation of the KKEP court resolved by following the activities of RapatKerjaTeknis (Rakernis) organized by the Bidang Hukum Polda Jateng and Rapat Kerja Teknis (Rakernis) of Bid Propam and Divpropam of MabesPolri once a year. Their sense of pity or *ewuh pekewuh* attitude of the official of KKEP to the family of the alleged infringer is overcome by looking at the development of the alleged infringer whether it has received a deterrent effect from the violations committed.

Keywords: *application of sanctions, Ethic Code, Polres Semarang's Jurisdiction*